

Nama : Annisa Yulianti

NPM : 2323031062

Kelas : C 2023

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

Dosen Pengampu : 1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

2. Meyta Pritandhari, S.Pd., M.Pd.

3. Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd.

CASE STUDY

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pemerintah Provinsi *Nusantara Raya* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah memiliki guru berlebih di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembanding, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem *performance-based budgeting*
- Mengalokasikan dana berbasis kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru
- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

TUGAS ANDA

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

1) Analisis Struktur Pengeluaran

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Jawab: Dari hasil yang sudah dilihat, secara nominal alokasi 22% dari APBD sudah melampaui mandat konstitusi (20%). Namun, secara fungsional, struktur ini belum efisien. Dominasi biaya operasional (gaji & tunjangan sebesar 68%). Yang tidak dibarengi dengan hasil capaian belajar menunjukkan terjadinya *inefficiency in spending*. Anggaran habis untuk biaya rutin, bukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Bagian yang perlu direalokasi:

- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Jawab: Bagian yang perlu direalokasi:

- Belanja Pegawai (Gaji/Tunjangan): Mengapa? Karena bukan dikurangi jumlahnya, melainkan direstrukturisasi melalui redistribusi guru. Biaya ini harus dikaitkan dengan beban kerja dan penempatan di daerah terpencil (insentif khusus).
- Biaya Administrasi (12%): Mengapa? Karena anggaran ini perlu ditekan melalui digitalisasi sistem birokrasi, sehingga sebagian dapat dialihkan ke Infrastruktur Digital dan Peningkatan Mutu Guru.

2) Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Jawab: Ya, pembiayaan saat ini tampak masih bergantung pada APBD (Pemerintah Daerah). Dalam jangka panjang, ini berisiko bagi keberlanjutan program jika terjadi fluktuasi ekonomi daerah.

- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat.

Jawab: Sangat diperlukan untuk menutup celah anggaran infrastruktur untuk relevansi lulusan. Model yang tepat adalah:

- *Corporate Social Responsibility (CSR) Terpadu:* Fokus pada penyediaan infrastruktur digital di sekolah pedesaan.
- *Public-Private Partnership (PPP):* Kerja sama dengan penyedia teknologi pendidikan (*EdTech*) untuk platform pembelajaran tanpa membebani kas daerah secara langsung di awal (sistem lisensi atau bagi hasil).

3) Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?

Jawab: Elemen yang realistis diadopsi, yaitu:

- *Equity-based Funding:* Mengalokasikan dana lebih besar kepada siswa atau sekolah yang memiliki latar belakang ekonomi rendah atau berada di wilayah terpencil (bukan sekadar jumlah kepala).
- *Performance-based Budgeting:* Memberikan insentif anggaran tambahan bagi sekolah yang berhasil menunjukkan progres nyata dalam skor literasi dan numerasi.

- Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Jawab: Tantangan yang dapat di implementasikan, yaitu:

- *Infrastruktur Data:* Sulit mengukur performa jika pendataan (Dapodik atau sistem serupa) belum akurat atau sering dimanipulasi.
- *Resistensi Politik:* Perubahan struktur gaji seringkali mendapat tantangan dari organisasi profesi atau birokrasi internal.

4) Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- Perubahan struktur belanja
- Strategi peningkatan kualitas guru
- Digitalisasi sekolah
- Mekanisme monitoring dan evaluasi

Jawab: Visi: Tranformasi Pendidikan Berbasis Kualitas dan Keadilan

Tahun	Fokus Utama	Strategis
1-2	Penataan Fondasi	Audit data guru, pemetaan kebutuhan infrastuktur digital, dan audit efisiensi belanja administrasi.
3	Redistribusi & Digitalisasi	Implementasi tunjangan khusus daerah terpencil dan pemasangan jaringan internet/perangka di sekolah prioritas
4-5	Penguatan Kualitas	Penerapan insentif berbasis performa untuk guru dan evaluasi dampak terhadap skor literasi/numerasi siswa

Strategi Inti:

1. Peningkatan Kualitas Guru: Mengalihkan sebagian tunjangan umum menjadi tunjangan berbasis kompetensi dan beban kerja. Guru yang mengajar di desa atau berhasil meningkatkan nilai siswa mendapatkan insentif lebih tinggi.
2. Digitalisasi Sekolah: Menggunakan skema pembiayaan alternatif (CSR/Hibah) untuk membangun pusat belajar digital (*Digital Learning Hub*) di setiap kecamatan guna mengatasi ketimpangan kota-desa.
3. Monitoring & Evaluasi: Membentuk unit Data-Driven Education yang bertugas melakukan tes rutin (semacam mock exam nasional)

untuk memantau efektivitas penggunaan dana terhadap hasil belajar siswa secara real-time.